

Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS

Firdhan Dwi Kurniawan*¹

Refo Prawira²

Azam Fatahillah Eleizar³

Vala Mutiara Ridwan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*e-mail : firdhan.dk22@mhs.uinjkt.ac.id¹, refo.prawira@mhs.uinjkt.ac.id²,
fatahillah.azam22@mhs.uinjkt.ac.id³, vala.mutiara22@mhs.uinjkt.ac.id⁴

Abstrak

Prinsip bebas-aktif merupakan landasan utama dalam politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno. Prinsip ini memberikan panduan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik yang setara dan saling menghormati dengan berbagai pihak. Tulisan ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip bebas-aktif Indonesia dalam membina hubungan diplomatik. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis deskriptif data kualitatif penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip bebas-aktif dalam berhubungan dengan negara-negara lain dan dipengaruhi oleh aspek-aspek lainnya seperti kepentingan nasional dan politik dalam negeri.

Kata kunci: politik luar negeri, hubungan internasional, BRICS

Abstract

The principle of freedom and activity has been the main foundation in Indonesian foreign policy since the Soekarno era. This principle provides guidance for Indonesia to establish equal and respectful diplomatic relations with various parties. This article aims to analyze Indonesia's application of the free-active principle in fostering diplomatic relations. By using the case study method and descriptive analysis of qualitative data, this research found that Indonesia has implemented the principle of freedom and activity in dealing with other countries and is influenced by other aspects such as national interests and domestic politics.

Keyword: foreign policy, international relations, BRICS

PENDAHULUAN

Dalam dikursus hubungan internasional kontemporer, terdapat pendapat ahli yang menyamakan pengertian kebijakan luar negeri dengan politik luar negeri. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa politik luar negeri adalah suatu strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Carlton Clymer Rodee, Totton James Anderson, Carl Quimby Christol, dan Thomas H. Greene, politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri memiliki hubungan erat dengan proses pembuatan keputusan atau kebijakan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.¹ Selain itu, Departemen luar negeri Indonesia dalam bukunya, Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (1984-1988) menjelaskan bahwa politik luar negeri adalah suatu kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia Internasional.²

Di Indonesia sendiri, politik luar negeri selalu dikaitkan dengan prinsip dasarnya, yaitu politik bebas-aktif. Prinsip tersebut tercatat pertama kali dicetuskan oleh Sutan Sjahrir di New Delhi pada tahun 1947, pada saat *Inter Asia Relations Conference*. Di pertemuan itu Sjahrir mengatakan: "Dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antara kekuatan yang saling bermusuhan sekarang: antara blok Anglo-Saxon dan Soviet Rusia. Tetapi kita secara benar,

¹ Kusno, Malikul. 2014. "Konfrontasi Journal: Jurnal Kultur, Ekonomi, dan Perubahan Sosial". *Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia*.

² Kusno, Malikul. 2014. "Konfrontasi Journal: Jurnal Kultur, Ekonomi, dan Perubahan Sosial". *Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia*.

menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud internasional yang sesuai dengan kehidupan *intern* kita, dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita.”³

Pernyataan Sjahrir di atas dengan jelas mengisyaratkan kebebasan sikap untuk lepas dari “perangkap” dan “sistem-sistem yang tidak cocok” atau “sistem-sistem yang bermusuhan” dengan dasar konstitusi. Pernyataan tersebut sekaligus menemukan konteksnya di masa itu, di mana dua kekuatan besar dunia bersaing memperebutkan pengaruh, yaitu blok Soviet dan blok Sekutu.

Dalam pengertian singkatnya, politik bebas-aktif Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: Pertama, Bangsa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara manapun. Kedua, Indonesia aktif dalam keikutsertaannya untuk menciptakan perdamaian dunia.⁴

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif didasarkan pada landasan konstitusional, yakni tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang memuat bahwa Indonesia ikut terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, posisi politik luar negeri Indonesia juga tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia yang berisi bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas-aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan adalah analisis deskriptif data kualitatif sekunder. Sumber-sumber yang kami gunakan adalah jurnal ilmiah, rilis dari instansi pemerintahan, artikel berita, dan lain-lain. Selain itu, penelitian juga menggunakan metode studi kasus di mana kami menganalisis topik ini dengan BRICS dan Indonesia sebagai objek penelitian. Data akan diproses dan dianalisis untuk mengetahui pengaruh politik bebas-aktif dalam hubungan internasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Yang Lahir Di Tengah Dua Ideologi Besar

Politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia tidak lepas dari pengaruh dinamika politik internasional pasca Perang Dunia II yang didominasi oleh Blok Barat dan Blok Timur dalam konteks perang dingin. Banyak negara-negara di dunia ini pun tak lepas dari arus konstelasi tersebut, mereka berlomba untuk menjadi aliansi Blok Barat maupun Blok Timur. Posisi ini cukup membuat Indonesia mengalami masa-masa sulit sehingga terjadi konflik domestik antara golongan kiri yang pro terhadap Blok Timur dan golongan kanan yang pro terhadap Blok Barat.

Dalam situasi politik tersebut, Bung Hatta mencoba merumuskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Praktek nyata dari prinsip tersebut tertuang dalam beberapa hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia yaitu, menjadi inisiator dalam pembentukan Gerakan non-Blok melalui KTT Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 sebagai wujud ketidakberpihakan Indonesia kepada Blok AS maupun Blok Soviet (wujud makna bebas). Gerakan Non Blok (GNB) didirikan dilatarbelakangi oleh munculnya dua blok, yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia dan adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Gerakan Non-Blok itu sendiri lahir dari pertemuan puncak Asia-Afrika pada konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Negara-negara yang tidak memihak blok tertentu telah menyatakan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi Ideologi Barat – Timur. Berdirinya Gerakan Non Blok (*Non Aligned Movement*) diprakarsai oleh para pemimpin negara yaitu:⁵

- Indonesia (Presiden Soekarno),
- Republik Persatuan Arab–Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser),

³ *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa*. 1966. Departemen Luar Negeri.

⁴ Katon, Baiq Giri Sekar. 2019. *Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*.

⁵ Rahman, Nansy. 2020. Peran Aktif Indonesia Pada Masa Perang Dingin Sejarah Kelas XII. Modul Pembelajaran SMA. Kemendikbud.

- India (Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru),
- Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito),
- dan Ghana (Presiden Kwame Nkrumah).

Dalam GNB, Indonesia memiliki peran penting sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, tidak mendukung pakta militer atau aliansi militer manapun. Prinsip tersebut dianggap sesuai dengan tujuan didirikannya GNB.

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Indonesia mulai berjalan ke arah poros kiri. Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno di era ini memiliki kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis.⁶ Sejumlah monumen persahabatan Indonesia dan Uni Soviet bertebaran di berbagai wilayah Indonesia yang antara lain :

1. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK);
2. Pabrik Baja Krakatau Steel;
3. dan jalan raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.

Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar mercusuar di mana dibuat poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Hal ini menyulut kontroversi dimata dunia internasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-Blok menjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeri bebas aktif saat itu.

Pada tahun 1966, setelah peristiwa Gerakan 30 September dan pergantian kekuasaan, Soeharto menjadi presiden dan memimpin Indonesia hingga tahun 1998. Di bawah kepemimpinannya, politik bebas aktif tetap menjadi landasan, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Soeharto lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan kestabilan politik dalam negeri, sehingga menjadikan Indonesia lebih pragmatis dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Soeharto melanjutkan upaya untuk menjaga keseimbangan dengan berbagai kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dia menekankan hubungan yang lebih baik dengan Barat, terutama dalam konteks membuka diri terhadap investasi asing dan dukungan ekonomi. Di tingkat internasional, Soeharto mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat, terutama dengan Amerika Serikat yang sebelumnya terganggu akibat ketegangan pada masa pemerintahan Soekarno.⁷ Politik bebas aktif di bawah pemerintahan Soeharto tetap menjadi pilar utama dalam hubungan internasional Indonesia. Prinsip tersebut mencakup kemandirian, ketidakaliansan, dan keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia berusaha untuk tidak terikat pada blok-blok politik tertentu dan mengejar kebijakan luar negeri yang mandiri dan non-ideologis.

Pada masa Perang Dingin, Indonesia menjalankan kebijakan politik bebas aktif sebagai strategi yang unik dan penuh tantangan. Negara ini, seperti kapal yang mendayung di antara dua pulau besar yaitu Blok Barat dan Blok Timur, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan di tengah ketegangan dan rivalitas geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seakan menjadi nahkoda kapal yang mengarungi lautan politik internasional, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada awal Perang Dingin menunjukkan ketangguhan dan keberanian dalam menghadapi arus yang tidak menentu. Terletak di persimpangan antara kepentingan global, Indonesia berusaha menjauhkan diri dari kecenderungan untuk sepenuhnya terlibat dalam konflik ideologis antara kapitalisme Barat dan komunisme Timur.

Pada saat yang sama, Indonesia tidak menolak untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan kedua blok besar tersebut. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia berusaha memanfaatkan peluang dari kedua pihak, mencari dukungan ekonomi dan politik tanpa harus mengambil posisi yang terlalu tegas. Kapal politik bebas aktif Indonesia terus mendayung di

⁶ Adnan, Mohamad Ichsanudin. 2022. Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Tirto.id. Dilansir dari tautan <https://tirto.id/sejarah-politik-luar-negeri-indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-gyK1>.

⁷ Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies.

antara dua pulau besar, menciptakan jalur sendiri yang memungkinkan negara ini memanfaatkan hubungan dengan kedua blok tanpa terjerat dalam ikatan yang merugikan. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemandirian dan perannya sebagai mediator di antara negara-negara yang baru merdeka. Upaya untuk menjaga keseimbangan di antara kekuatan besar dilakukan dengan cerdas, dan Indonesia terus mempertahankan identitasnya sebagai negara yang tidak akan diintervensi oleh kepentingan asing.

Namun, ketika 'kapten' politik bebas aktif Indonesia berubah menjadi Soeharto pada pertengahan 1960-an, terjadi penyesuaian jalur di tengah lautan geopolitik. Indonesia terus mendayung, tetapi kini dengan penekanan yang lebih kuat pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik internal. Soeharto lebih memilih jalur pragmatis dalam hubungan internasional, mencari investasi asing dan bantuan ekonomi tanpa harus terlalu terlibat dalam retorika politik yang dapat merugikan pertumbuhan negara. Sebagai hasil dari kepemimpinan Soeharto, kapal politik bebas aktif Indonesia semakin kokoh dan stabil. Pergeseran tersebut mencerminkan adaptasi terhadap dinamika global dan nasional yang berkembang, menunjukkan bahwa dayungannya terus diarahkan menuju kepentingan nasional dan pembangunan.⁸

Kepentingan Nasional dan Politik Domestik Sebagai Sumber Tafsir Implementasi

Politik bebas-aktif—seperti yang telah dijelaskan sebelumnya—menjadi landasan untuk setiap aktivitas hubungan internasional Indonesia. Namun pada prakteknya, kerap kali politik bebas-aktif ditafsirkan berbeda sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Pada masa orde lama, politik bebas-aktif awalnya ditafsirkan sebagai "Indonesia tidak memihak kubu manapun dan berdiri sendiri untuk menjalankan pemerintahannya". Kemudian di masa demokrasi terpimpin periode 1959-1966, kedekatan Indonesia dengan Soviet membuka kecenderungan posisi terhadap blok timur. Keretakan hubungan dengan negara-negara barat juga membuat Presiden Soekarno kerap kali mengeluarkan kebijakan luar negeri yang pro blok timur.⁹ Hal ini ditafsirkan sebagai "Indonesia bebas memilih dekat dengan kubu manapun demi kepentingan negaranya."

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan, ambisi, atau hasrat sebuah negara untuk mempertahankan eksistensinya. Kepentingan nasional sendiri merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional yang kerap kali mempengaruhi kebijakan suatu negara.¹⁰ Dalam Jurnalnya, Wijayanti menuliskan bahwa kepentingan nasional berpengaruh besar bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Namun meskipun begitu, menurutnya kepentingan nasional tidak tepat apabila dijadikan acuan untuk membentuk kebijakan luar negeri. Ia memiliki beberapa argumen yang di antaranya adalah:¹¹

- 1) kepentingan nasional dibentuk oleh segelintir orang dan tidak mewakili negara secara keseluruhan
- 2) kepentingan nasional dipenuhi subjektivitas dan terpengaruh oleh kondisi pada masa itu sehingga hanya berlaku dalam jangka singkat

Selama perkembangan negara Indonesia—dari masa orde lama hingga sekarang—kepentingan nasional sering kali menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada masa transisi dari orde lama menuju orde baru. Pada saat itu, Indonesia mengalami kemelut ekonomi yang parah. Hal ini menuntut pemerintah pada masa tersebut untuk mencari rekan kerja, investor, dan membuka keran diplomasi yang lebih luas lagi kepada negara-negara besar pada saat itu. Karena kepentingan nasional ini, Indonesia

⁸ Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. *KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies*.

⁹ Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. *KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies*.

¹⁰ Sudarsono, Budayanto Putro, dkk. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 8 No. 3

¹¹ Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. *KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies*.

memperbaiki hubungan dengan negara-negara blok barat yang sebelumnya sempat rusak pada masa demokrasi dipimpin Presiden Soekarno.

Kepentingan nasional pada masa orde baru telah mengubah arah kecenderungan Indonesia. Meskipun begitu, politik bebas-aktif tetap dijalankan. Hanya saja, implementasinya cukup berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini tafsiran dari politik bebas aktif berubah dari “Indonesia tidak bersama kubu manapun” menjadi “Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan kubu manapun”.¹²

Di samping kepentingan nasional, politik dalam negeri turut menyumbang andil besar dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Wijayanti, negara dibentuk oleh banyak pihak dan bukanlah sebuah kesatuan entitas. Di dalamnya terdapat masyarakat dan beragam bentuk pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pandangan politik dari partai politik yang berkuasa juga turut serta mempengaruhi *output* kebijakan luar negeri Indonesia.¹³ Pandangan politik Soekarno yang kiri membuatnya cenderung lebih dekat dengan negara-negara revolusioner dan bekas jajahan bangsa Eropa. Kemelut perpolitikan pasca peristiwa G30SPKI membuat Soeharto mendekat kepada Amerika Serikat yang kala itu merupakan musuh dari komunisme.

Perkembangan BRICS dan Pengaruh Bebas-Aktif

BRICS merupakan perkumpulan negara-negara berkembang yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Perkumpulan itu sendiri awalnya terbentuk dari 4 negara yaitu, Russia, China, India, dan Brazil pada tahun 2009. Setahun berikutnya, Afrika Selatan bergabung dan membentuk akronim BRICS. Perkumpulan ini berfokus pada sektor ekonomi terutama dalam menghadang hegemoni ekonomi negara-negara barat.¹⁴

Isu kemunduran Amerika Serikat sebagai pemimpin ekonomi dunia mulai sering dimainkan dalam beberapa tahun terakhir. Negara seperti China—yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan progres yang sangat mengesankan—menjadi salah satu penantang dalam hegemoni model kekuasaan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Invasi skala besar yang dilancarkan oleh Rusia ke Ukraina menambah perpecahan yang terjadi di antara kubu kekuasaan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kubu negara-negara BRICS. Sebaliknya, hubungan China dengan Russia justru menjadi lebih dekat akhir-akhir ini.¹⁵

Dari tren perpecahan-kedekatan ini muncul isu polarisasi yang semakin besar. Negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti kubu yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau berpindah haluan menuju kubu baru yang dipimpin oleh Rusia dan China. Pasca perang Rusia-Ukraina, BRICS mulai melangsungkan ekspansinya. Pada 1 Januari 2024, BRICS akan menerima secara formal enam anggota barunya. Di antaranya, Argentina, Ethiopia, Saudi Arabia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab.¹⁶ Indonesia sebagai negara besar, anggota G20, dan memiliki potensi strategis tak luput juga dari peluang untuk bergabung bersama BRICS.

Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini negara masih mengkaji perihal keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diterima Indonesia apabila bergabung ke dalam BRICS. Negara tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, sampai sekarang negara belum menyatakan keberpihakannya.¹⁷

¹² Yuniarto, Topan. 2022. Politik Luar Negeri Indonesia: Profil, Sejarah, dan Aktualitas. Kompas.id. Dilansir dari tautan <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/03/15/politik-luar-negeri-indonesia-profil-sejarah-dan-aktualitas>.

¹³ Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies.

¹⁴ Acharya, Bhargav. 2023. *What Is BRICS, Which Countries Want To Join, and Why?*. Reuters. Dilansir dari tautan <https://www.reuters.com/world/what-is-brics-who-are-its-members-2023-08-21/>.

¹⁵ Adler, Nils. 2023. *Can BRICS Create A New World Order?*. Aljazeera. Dilansir dari tautan <https://www.aljazeera.com/amp/features/2023/8/22/can-brics-create-a-new-world-order>.

¹⁶ Plessis, Carien, dkk. 2023. *BRICS Welcomes New Members In Push To Reshuffle World Order*. Reuters. Dilansir dari tautan <https://www.reuters.com/world/brics-poised-invite-new-members-join-bloc-sources-2023-08-24/>.

¹⁷ Kabinet Sekretariat Negara. 2023. *President Jokowi: Indonesia Still Reviews Prospects For BRICS Membership*. Setkab.go.id. Dilansir dari tautan <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-still-reviews-prospects-for-brics-membership/>.

Salah satu alasan utama dari pertimbangan negara adalah prinsip bebas-aktif yang dianut Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara tetap mempertahankan posisinya yang “bebas menentukan pilihan dalam memandang suatu isu atau permasalahan”.¹⁸ Begitu pula dengan isu ekspansi BRICS. Kehadiran blok ekonomi tersebut sudah dianggap sebagai penantang dari model kekuasaan ekonomi yang telah ada, contohnya G7. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, hal itu dapat diartikan sebagai keberpihakan negara kepada kubu penentang kekuatan-kekuatan besar dan akan menyalahi prinsip fundamental dari kebijakan luar negeri Indonesia, bebas-aktif.¹⁹

Pada periode sekarang ini, politik bebas-aktif ditafsirkan sebagai “Indonesia bebas menjalankan kepentingannya tanpa mengikuti kubu-kubu besar yang ada”. Pasca reformasi, hubungan internasional Indonesia dicirikan dengan diplomasi menyeluruh ke setiap kelompok negara. Indonesia dengan bebas menjalankan hubungan ekonomi yang erat dengan China tanpa perlu menghapus hubungan diplomasi keamanan dengan Amerika Serikat. Dalam menerapkan sistem bebas aktif pula, Indonesia harus menerapkan kehati-hatian terhadap setiap kebijakan yang diambil. Inilah yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon perihal peluang keanggotaan BRICS. Selain dari segi ekonomi, Indonesia juga mempertimbangkan segi keseimbangan kekuatan dan geopolitik kawasan yang bisa jadi terganggu apabila negara sebesar Indonesia bergabung ke dalam salah satu kubu.

KESIMPULAN

Politik bebas-aktif adalah prinsip fundamental dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip ini menekankan pada kebebasan berdiplomasi dan keaktifan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, prinsip bebas-aktif selalu mempengaruhi aktivitas luar negeri Indonesia. Pada masa Perang Dingin, prinsip ini lahir dan memiliki tafsiran yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi pada masa itu. Meskipun konflik dua ideologi besar telah usai puluhan tahun lalu, prinsip ini tetap menjadi acuan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan menguatnya isu polarisasi beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan prinsip fundamentalnya. Oleh karenanya, Indonesia perlu ekstra berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menentukan arah politik luar negeri ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusno, Malikul. 2014. “Konfrontasi Journal: Jurnal Kultur, Ekonomi, dan Perubahan Sosial”. Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia.
- Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa. 1966. Departemen Luar Negeri.
- Katon, Baiq Giri Sekar. 2019. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia.
- Rahman, Nansy. 2020. Peran Aktif Indonesia Pada Masa Perang Dingin Sejarah Kelas XII. Modul Pembelajaran SMA. Kemendikbud.
- Adnan, Mohamad Ichsanudin. 2022. Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Tirto.id. Dilansir dari tautan <https://tirto.id/sejarah-politik-luar-negeri-indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-gyK1>.
- Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies.
- Sudarsono, Budayanto Putro, dkk. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Vol. 8 No. 3

¹⁸ Wijayanti, Anita. 2022. PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF. KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies.

¹⁹ Rüländ, Jürgen. 2023. *Why Indonesia Chose Autonomy Over BRICS Membership*. EAST ASIA FORUM. Dilansir dari tautan <https://www.eastasiaforum.org/2023/10/25/why-indonesia-chose-autonomy-over-brics-membership/>.

- Yuniarto, Topan. 2022. Politik Luar Negeri Indonesia: Profil, Sejarah, dan Aktualitas. Kompas.id. Dilansir dari tautan <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/03/15/politik-luar-negeri-indonesia-profil-sejarah-dan-aktualitas>.
- Acharya, Bhargav. 2023. What Is BRICS, Which Countries Want To Join, and Why?. Reuters. Dilansir dari tautan <https://www.reuters.com/world/what-is-brics-who-are-its-members-2023-08-21/>.
- Adler, Nils. 2023. Can BRICS Create A New World Order?. Aljazeera. Dilansir dari tautan <https://www.aljazeera.com/amp/features/2023/8/22/can-brics-create-a-new-world-order>.
- Plessis, Carien, dkk. 2023. BRICS Welcomes New Members In Push To Reshuffle World Order. Reuters. Dilansir dari tautan <https://www.reuters.com/world/brics-poised-invite-new-members-join-bloc-sources-2023-08-24/>.
- Kabinet Sekretariat Negara. 2023. President Jokowi: Indonesia Still Reviews Prospects For BRICS Membership. Setkab.go.id. Dilansir dari tautan <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-still-reviews-prospects-for-brics-membership/>.
- Rüland, Jürgen. 2023. *Why Indonesia Chose Autonomy Over BRICS Membership*. Dilansir dari tautan <https://www.eastasiaforum.org/2023/10/25/why-indonesia-chose-autonomy-over-brics-membership/>.